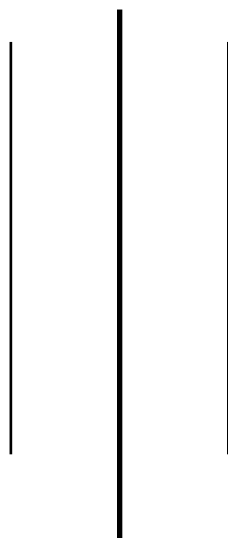




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2019**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 /791/ TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sebagai mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 serta sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal



BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 050/ /TAHUN 2019

TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Bappeda
23. Bapenda
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/ / TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan Badan Peneglolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta sebagai acuan dalam penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2020 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja BPKAD Tahun 2020 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2020 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2016 -2021. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi satu satunya tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2016-2021. Renja BPKAD Tahun 2020 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2020 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun Anggaran 2020.

Pemalang, 19 Juni 2019

KEPALA BPKAD
KABUPATEN PEMALANG



W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
19661224 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/ /TAHUN 2019 TENTANG RENJA BPKAD 2020	ii
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 050/791/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	60
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	60
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	63
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju 2021	63
BAB V PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019	14
Tabel : 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang	32
Tabel :2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pemalang	46
Tabel : 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020	59
Tabel : 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana 2021	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

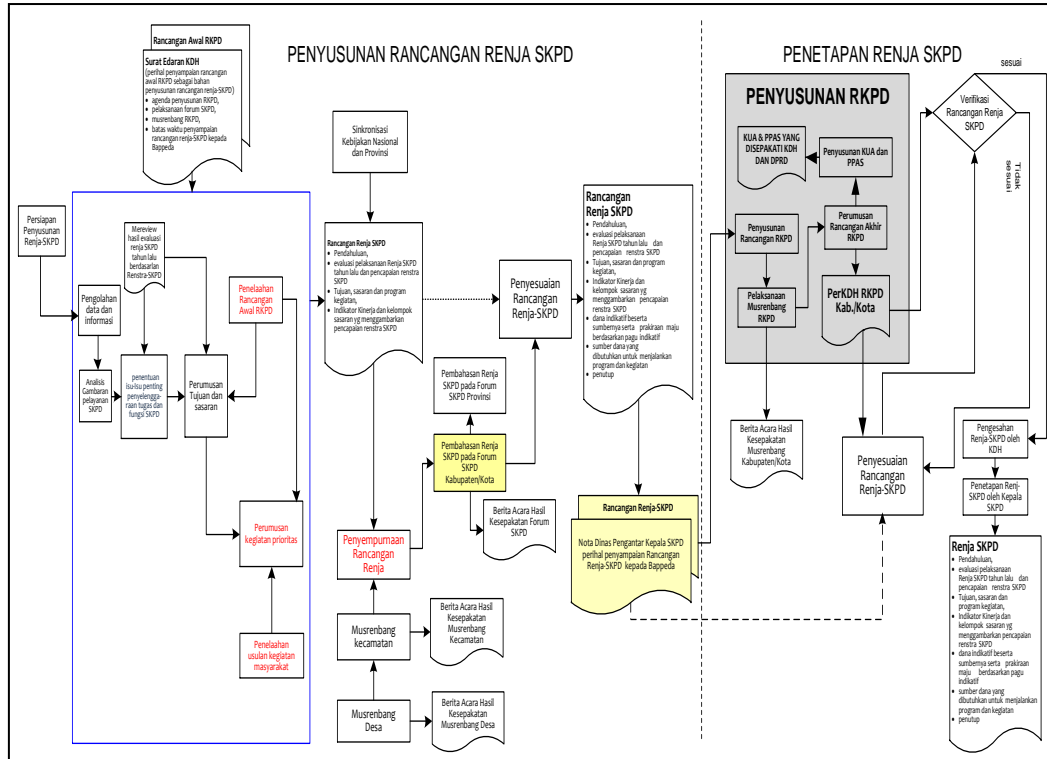
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2020 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2020;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD Tahun 2020.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber gambar : Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2020, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana KLERja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;

22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

- 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya menetapkan Rencana Kerja Tahun 2020 dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang meliputi :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 19 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.700 surat/nota dinas;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 155 unit;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target 32 unit;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 14 SK, 24 Laporan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan untuk 12 bulan;
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target 10 unit;
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 Paket, 30 Jenis;
9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan targetnya 3 Paket, 15 Jenis;

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 12 kali;
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 5 unit;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 2 jenis;
13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 4 jenis;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 2 jenis;
15. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah dengan target 20 Laporan;
16. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 2.860 Dokumen;
17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan dengan target 11.000 SP2D;
18. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas dengan target 300 SPD;
19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji dengan target 500 SKPP.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 52 unit;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 3 unit;
3. Pengadaan Meubeleur dengan target 23 unit;
4. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 25 unit;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 32 unit;

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 10 Jenis;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit.
10. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan target 1 paket;
11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 50 unit;
12. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan target 2 sistem.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 75 orang.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 15 Dokumen;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2 Laporan;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 2 Laporan.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi dengan target 2 Dokumen.
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 2 Dokumen.
6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 24 laporan.

V. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 12 Dokumen.

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 25 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan target 2 Dokumen;
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 2 Dokumen;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 1 raperda;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan target 1 perbup;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan target 1 Raperda;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target 1 Perbup;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 1 Raperda;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 1 Perbup;
9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 120 orang;
10. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pematang Siantar dengan target 46 sertifikat, 96 papan identitas;
11. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS dengan target 12.400 dokumen;
12. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 150 SPT;
13. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 2 kali kegiatan;
14. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 4 Dokumen;
15. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 2 laporan;
16. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;
17. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;

18. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 dokumen;
19. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 50 Laporan;
20. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 2 Laporan;
21. Sosialisasi/peningkatan SDM/pengurus barang/SIMDA BMD dengan target 2 kali;
22. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 4 laporan;
23. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 1 laporan;
24. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 24 Laporan;
25. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan.

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2018 di BPKAD sebesar 92,47%. Terdapat 19 Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 85%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

Tabel :2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2018 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Bidang Keuangan										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnyasurat masuk dan surat keluar (surat/notdin)	45.500	22.500	7.700	7.700	100,00	8.000	38.200	83,96
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet (bulan)	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya jaminan kendaraan dinas/ operasional (unit)	880	415	155	154	99,35	185	754	85,68
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (unit)	223	64	32	32	100,00	53	149	66,82
01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD (Dokumen) Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD (laporan) Terlaksananya publikasi informasi (kali)	216	72	36	36	100,00	36	144	66,67
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor (bulan)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (bulan)	50	20	10	10	100,00	10	40	80,00

01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket, buah)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (kali)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	548	308	85	85	100,00	83	474	86,50
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia koran, majalah dan buku perundang - undangan (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (jenis)	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat dan Laporan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi (Laporan)	100	40	20	20	100,00	20	80	80,00
01	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.(Laporan)	14.000	5.600	2.800	2.800	100,00	2.800	11.200	80,00
01	23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Prosentase terselesaikannya penelitian dan penerbitan SP2D (SP2D)	40.000	14.500	10.000	10.000	100,00	11.000	35.500	88,75
01	24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana SKPD dan Anggaran Kas (Dokumen)	1.250	500	300	300	100,00	275	1.075	86,00
01	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Tersusunnya SKPP dan SP2D Belanja Gaji SKPD (SKPP)	5.000	3.000	500	500	100,00	500	4.000	80,00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan								
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	80	28	52	52	100,00	0	80	100,00
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (unit, paket)	13	4	3	3	100,00	3	10	76,92
02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit)	35	2	12	10	83,33	17	29	82,86

02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan komputer terhadap kebutuhan (unit)	50	13	25	25	100,00	9	47	94,00
02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit gedung)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	180	64	32	32	100,00	52	148	82,22
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	150	66	33	33	100,00	33	132	88,00
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (paket)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	300	100	50	50	100,00	75	225	75,00
02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistim informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan BMD yang dapat berjalan dengan baik (sistem,jaringan)	6	2	1	1	100,00	2	5	83,33
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi bagi ASN di BPKAD serta terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi (orang)	375	196	10	10	100,00	85	291	77,60
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya LKJIP (Dokumen) Tersusunnya PK dan RKT (Dokumen)	80	30	15	15	100,00	17	62	77,50
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (Dokumen)	95	35	20	20	100,00	20	75	83,33

06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Tersusunnya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen,laporan)	60	28	14	14	100,00	14	56	93,33
06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen)	291	144	138	138	100,00	3	285	97,94
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporanrealisasi pendapatan dan belanja hasil rekonsialisasi SKPD & PPKD (laporan)	144	48	24	24	100,00	48	120	83,33
06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya RTP Tersusunnya Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Tersusunnya buku kumpulan tindak lanjut LHP BPK RI	57	0	0	0	100,00	19	38	66,67
09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia								
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA BPKAD dan PPKD termasuk penggeserannya Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD beserta perubahannya (Dokumen)	65	26	13	13	100,00	13	52	80,00
15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD - Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD - Ketepatan Waktu Penyampaian LKD kepada BPK - Ketepatan Waktu Pencairan Dana - Pemanfaatan Aset Daerah 								
15	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Buku SSH Tahun 2020 dan perubahan SSH Tahun 2019 (Dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
15	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbup tentang kebijakan akuntansi Pemda (dokumen) Tersusunnya buku saku ringkasan perbup tentang kebijakan akuntansi pemda (dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
15	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2019 (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Tersusunnya perda tentang APBD (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya bintek tentang pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terfasilitasinya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pematang (sertifikat) Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik Pemkab pematang dan dalam kondisi baik (papan)	750	300	142	142	100,00	140	582	77,60
15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya Dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD (Dokumen)	62.000	24.800	12.400	12.400	100,00	12.400	49.600	80,00
15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Terbayarnya PBB tanah milik pemda (bidang)	620	300	150	67	44,67	78	445	71,77
15	22	Retribusi Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya distribusi BMD (kali)	20	8	3	2	66,67	4	16	80,00
15	23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU	Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah Tersusunnya SK Pengurus barang & perubahannya Tersusunnya RKBMD dan RKPBM Tahun (Dokumen)	25	10	5	5	100,00	5	20	80,00
15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD Semesteran Tersusunnya Laporan rekonsiliasi BMD (Laporan)	20	4	2	2	100,00	4	10	50,00
15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD (Laporan)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD (Laporan)	84	48	12	12	100,00	12	72	85,71

15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen)	5	2	1	1	100,00	3	4	80,00
15	35	Peningkatan kapaitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah (Laporan)	500	200	100	100	100,00	100	400	80,00
15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah (Laporan)	19	7	4	4	100,00	4	15	78,95
15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Terlaksananya kegiatan bimtek dan pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi pengurus barang (kali)	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00
15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/BMD	Tersusunnya Laporan Hasil pemantauan pemanfaatan aset (Laporan)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD konsolidasi	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil koordinasi tentang pengelolaan kas daerah Tersusunnya laporan mutasi deposito (Laporan)	120	48	24	24	100,00	24	84	70,00
15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya laporan bahan rancangan KUA PPAS selama satu tahun (laporan)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp.19.428.770.695,00 dari anggaran sebesar Rp.21.010.207.900,00 atau 92,47%. Terdapat 20 kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 85% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah hanya terealisasi sebesar 71,37%. Sisa anggaran merupakan sisa premi asuransi kendaraan dinas roda empat yang disebabkan pemenang lelang(Asuransi Sinar Mas) berani menetapkan pembayaran premi dibawah pagu anggaran sebesar 35% dengan nilai pertanggungan yang sama.
2. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar 79,24%. Kebutuhan bahan bacaan bulanan dan bahan bacaan peraturan perundang-undangan tidak sesuai rencana sebelumnya disebabkan pegawai lebih banyak menggunakan web dalam menelusuri regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah terealisasi sebesar 46,24%. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diluar rencana sebelumnya disebabkan Kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian/Lembaga/Instansi dilaksanakan melalui media elektronik.
4. Kegiatan Pengadaan Meubeleur terealisasi anggarannya sebesar 56,69%. Sisa anggaran disebabkan adanya penundaan pengadaan meubeleur karena adanya rencana penataan seluruh ruang BPKAD secara bertahap termasuk kebutuhan meubeleur masing-masing bidang.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan terserap sebesar 70,17%. Penggunaan BBM dan Oli bagi Mobil G 42 D lebih efisien dibanding tahun sebelumnya.
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terealisasi 53,24%. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional di BPKAD baik Roda Empat maupun Roda Dua hanya sebatas service, oli dan BBM operasional. Tidak ada penggantian suku cadang yang signifikan.

7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terealisasi 56,04%. Kegiatan ini digunakan untuk mengakomodir pemeliharaan AC. Persentase realisasi tidak tercapai maksimal karena AC yang rusak diganti dengan AC baru. Sehingga mengurangi kuantitas unit yang harus diservice.
8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur terserap sebesar 20%. Meubeleur di BPKAD masih dalam kondisi cukup baik, sehingga biaya pemeliharaan meubeleur tidak terserap optimal.
9. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya terealisasi sebesar 68,07%. Persentase penyerapan yang tidak optimal disebabkan tidak adanya penggantian suku cadang baik Laptop, Komputer PC maupun Printer.
10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi terealisasi sebesar 81,53%. Sisa anggaran merupakan belanja Bintek yang rencananya akan dilaksanakan untuk Bintek SIMDA terkait persediaan serta pelatihan SIMDA yang telah di upgrade oleh BPKP kepada perangkat daerah tetapi pelaksanaannya ditunda karena kebijakan akuntansi terkait persediaan masih dalam proses penyusunan.
11. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya terealisasi sebesar 31,01%. Permintaan pengiriman peserta untuk Diklat/Bintek/Sosialisasi/Workshop dari Instansi lain pada Tahun 2018 tidak sesuai dengan perkiraan.
12. Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terealisasi 76,27%. Sisa anggaran kegiatan ini merupakan sisa anggaran pengadaan tas kegiatan, jasa peserta rekonsiliasi dan perjalanan dinas. Hal ini disebabkan jumlah peserta rekonsiliasi tidak sebanyak tahun sebelumnya.
13. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditunda pelaksanaannya sehingga anggarannya di

nol kan. Anggaran Kegiatan ini di Nol kan karena pelaksanaan kegiatan ini merupakan lanjutan dari output yang dihasilkan kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemda rencana berupa penyusunan sistem persediaan, hal tersebut tidak dapat direalisasikan pada Tahun 2018 karena output kegiatan tersebut baru berupa study banding dan draft perbup.

14. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah terserap sebesar 65,42%. Rencana pelaksanaan kegiatan Bintek/Pendampingan dilaksanakan sebanyak 2 kali, terkait dengan sistem persediaan yang belum siap sehingga Bintek/Pendampingan hanya dilaksanakan satu kali.
15. Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang terealisasi 70,43%. Pembayaran biaya proses sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang ke BPN tidak sesuai dengan rencana sebelumnya karena dari target 46 sertifikat yang bisa diproses ternyata hanya 39 berkas pengajuan pensertifikatan tanah yang lolos dari verifikasi BPN.
16. Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah sebesar 74,41%. Sisa anggaran berupa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak direalisasikan karena distribusi barang tidak sampai keluar Kecamatan Pemalang.
17. Kegiatan Penyusunan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terserap 74,90%. Sisa anggaran karena adanya kegiatan pendampingan implementasi aplikasi persediaan yang tertunda pelaksanaannya karena pertimbangan waktu dan kesiapan regulasi yang belum memadai.
18. Kegiatan Pengelolaan Kerugian Daerah terserap sebesar 84,40%. Sisa anggaran merupakan Honorarium Tim TGR yang disebabkan karena kelebihan kuantitas dan kekeliruan penghitungan jumlah personil.
19. Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD terserap 83,56%. Kegiatan ini tidak tercapai optimal karena jumlah peserta sosialisasi/bintek

pengelolaan aset dan SIMDA BMD lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

20. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah (konsolidasi) terealisasi sebesar 75,69%. Jumlah anggota tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran honorarium kegiatan.

Dari sisi realisasi output, terdapat 6 kegiatan yang realisasi output kegiatannya tidak mencapai 100% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. Target output kegiatan ini merupakan pemberian jaminan (asuransi) terhadap alat berat dan kendaraan dinas roda empat dengan batas tahun pembuatan tertentu. Asuransi untuk alat berat ditargetkan sebanyak 5 unit, sedangkan asuransi untuk kendaraan dinas roda empat ditargetkan sebanyak 150 unit. Adapun realisasi output untuk kegiatan ini tidak tercapai 100% karena realisasi output untuk asuransi alat berat sebanyak 5 unit tetapi realisasi output untuk asuransi kendaraan roda empat hanya 149 unit. Sehingga dari total yang ditargetkan sebesar 155 unit, hanya terealisasi sebesar 154 unit. Hal ini terkait kebijakan dari pihak asuransi yang membatasi tahun pembuatan kendaraan dinas roda empat yang dapat dijamin, minimal tahun pembuatannya 2017.
2. Kegiatan Pengadaan Meubeleur. Kegiatan ini mentargetkan pengadaan meubeleur sebanyak 23 unit berupa kursi kerja pejabat dan pelaksana sebanyak 20 unit, 1 unit meja printer dan 2 unit lemari arsip. Realisasi output kegiatan ini hanya 20 unit kursi kerja pejabat dan pelaksana. Pengadaan lemari arsip dan meja printer tidak dilaksanakan terkait rencana penataan ruang kerja sekaligus penyediaan meubeleur untuk pengarsipan, agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
3. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini semula mentargetkan 10 pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat/Seminar/Sosialisasi/Workshop tetapi hanya terealisasi 4 orang ASN saja yang dikirim sebagai peserta pelatihan/diklat. Hal ini disebabkan penawaran Diklat / Seminar / Sosialisasi / Workshop terbatas.

4. Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang. Kegiatan ini target outputnya berupa pensertifikatan tanah milik pemda sebanyak 46 sertifikat dan pemasangan papan identitas pada tanah milik pemda sebanyak 96 unit. Realisasi outputnya untuk pemasangan papan identitas tanah milik pemda dapat terpenuhi yaitu 96 unit tetapi untuk sertifikat tanah hanya terealisasi sebanyak 39 sertifikat. Hal ini disebabkan berkas pengajuan sertifikasi tanah yang di ajukan oleh pemda ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pematang, yang memenuhi syarat dan dapat segera diproses sertifikatnya hanya 39 bidang tanah.
5. Kegiatan Pembayaran PBB Aset daerah/BMD. Kegiatan ini merupakan pembayaran PBB atas tanah milik pemda yang ditargetkan sebanyak 150 SPT tetapi hanya terealisasi 67 SPT. Hal ini disebabkan data yang diajukan oleh pihak kelurahan/kecamatan tidak sesuai target yang ditentukan.
6. Kegiatan Pendistribusi Barang. Kegiatan ini ditargetkan pelaksanaannya sebanyak 3 kali tetapi hanya terealisasi 2 kali. Pelaksanaan distribusi barang sangat tergantung pada pengadaan Kendaraan dinas yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyiapkan dan menyusun Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran;
2. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.

3. Menyiapkan petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyiapkan Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
6. Menyiapkan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
9. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pemalang;
10. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pemalang;
11. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
12. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;
13. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
14. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
15. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
16. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
17. Menyusun Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;

18. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
19. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
20. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
21. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
22. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
23. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
24. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
25. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
26. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
27. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kassesuai ketentuan yang berlaku;
28. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
29. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;
30. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
31. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
32. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
33. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
34. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
35. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD.

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. PAD

- 1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
 - 1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- 1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
 - 1.2.2. Penerimaan Jasa Giro
 - 1.2.3. Penerimaan Bunga
 - 1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah
 - 1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
 - 1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
 - 1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian
 - 1.2.8. Penerimaan Lain-Lain
 - 1.2.9. Pendapatan Sewa

2. Dana Perimbangan

- 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2.1.1. Bagi Hasil Pajak
 - 2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
- 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
- 2.3. Dana Alokasi Khusus
 - 2.3.1. DAK Fisik
 - 2.3.2. DAK Non Fisik

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

- 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
- 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
- 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
- 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun IKU BPKAD Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 penyampaian Raperda APBD ke DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Sedangkan penyampaian Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan pada pasal 172 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan pada Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan. Kategori ketercapaian indicator ini adalah 100% apabila tepat waktu, 50% apabila tidak tepat waktu dan 0% apabila tidak disampaikan.

IKU BPKAD ini didukung oleh 2 indikator program yaitu :

- a. Ketepatan waktu penyampaian RKA-SKPD
Penyusunan RKA/RKAP oleh SKPD merupakan bagian dari penyusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah menyusun RKA/RKAP sesuai dengan ketentuan penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan mendorong tercapainya target kinerja dari IKU BPKAD yang pertama.
- b. Ketepatan waktu penyusunan SPD
Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat waktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran

kas yang telah ditetapkan. Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dientry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. SP2D yang diterbitkan tepat waktu.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang diproses dalam waktu 3 hari sejak dibuatnya SPM SKPD dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD. Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka penerbitan SP2D dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (3 hari). Target dari IKU ini adalah 100% (tepat waktu atau 3 hari). IKU SP2D yang diterbitkan tepat waktu didukung oleh satu indikator program yaitu Ketepatan Waktu Pencairan Dana. Indikator Program Ketepatan Waktu pencairan dana diukur dengan membandingkan jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan ditransfer dananya ke rekening penerima dibanding dengan jumlah berkas usulan pencairan dana dari SKPD dalam satu tahun anggaran.

3. Pemanfaatan Aset Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh asset daerah yang seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang.

b. Pemindahtanganan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

c. Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. IKU BPKAD ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pematang yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu). Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

4. Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan Pasal 298 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya. IKU ini didukung satu Indikator Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester Pertama. Laporan Keuangan semesteran paling lambat disusun pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 291 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. BPKAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD sesuai target atau 100% (tepat waktu).

5. Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK RI di atur pada Pasal 297 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 296 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Laporan Keuangan Daerah disusun paling lambat bulan Maret Tahun berikutnya. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2019 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang Jaya telah mencapai WTP sebanyak 3 tahun berturut turut yaitu WTP atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2016, LKD Tahun 2017 dan LKD Tahun 2018. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	Indikator Program	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis	
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)	100%	Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D (3 hari sesuai SOP)	100%	Pencairan Dana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Pemanfaatan aset daerah. (Jumlah aset daerah yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan)	90%	Pengamanan Aset	60%	60%	60%	60%	50%	55%	60%	60%		
			Pemindahtanganan Aset	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
			Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD (bulan Juni tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK (bulan Maret tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitumelaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :

- Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media masa (surat kabar) dan Website BPKAD (pemalangkab.go.id/bpkad)
- Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pematang Jaya.
- Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pematang Jaya serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
- Mempublikasikan pencairan SP2D realtime yang dapat dilihat melalui monitor display yang diletakkan di luar kantor BPKAD dan melalui website BPKAD.

Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pematang Jaya, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasipengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.

2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses serifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Dalam hal inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 khususnya ketentuan tentang kodifikasi barang daerah. BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.
- Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
- Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.

- Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai aplikasi pendukung penyajian data aset daerah.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line. BPKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :
- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.
 - BPKAD menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran maupun realisasi di ruang computer BPKAD. Peningkatan fasilitas tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan spesifikasi yang cukup.

Analisis SWOT (*Stregths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selalu menyesuaikan diri dan

berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pematang Jaya;

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;

- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD yang belum terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam tiga tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017 dan 2018. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan

berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2016-2021 adalah “**Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera**”, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan visi ini, BPKAD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjatidiri, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerah lain tetapi pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal ini sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan BPKAD selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sewa aset berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain itu, BPKAD mengelola pendapatan yang masuk dalam pendapatan BPKAD selaku PPKD yaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro pemegang kas, jasa giro kas daerah dan pendapatan bunga deposito atas cash idle di RKUD Kabupaten Pematang Jaya.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD yang sah yang dikelola BPKAD selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh BPKAD selaku PPKD secara keseluruhan pengaruhnya tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pematang Jaya, tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan.

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan meningkatkan kinerja BPKAD dalam mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum yang memadai merupakan peran BPKAD dalam turut andil mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan secara profesional dan optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut.

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal karena faktor kurangnya SDM, sehingga perolehan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Sarana dan Prasarana yang memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN di BPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.

4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Pematang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			15.163.174.000				15.163.174.000		
4	04	<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</u>			15.163.174.000	-			15.163.174.000		
4	04	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	60%	3.739.627.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	60%	3.739.627.000	
4	04	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya surat/notdinyang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	11.500 surat/notdin	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya surat/notdinyang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	11.500 surat/notdin	30.000.000
4	04	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	12 bulan, 4 jenis	610.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	12 bulan, 4 jenis	610.000.000
4	04	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya JaminanKendaraan dinas dan Alat Berat Milik Pemkab Pematang	210 unit	830.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya JaminanKendaraan dinas dan Alat Berat Milik Pemkab Pematang	210 unit	830.000.000
4	04	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/ operasional	27 unit R-2, 5 unit R-4	15.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/ operasional	27 unit R-2, 5 unit R-4	15.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara selama satu tahun Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD Terpublikasinya Data, Informasi dan kegiatan kepada Publik melalui Website	440 buku, 8 SK Bupati, 24 laporan	270.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara selama satu tahun Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD Terpublikasinya Data, Informasi dan kegiatan kepada Publik melalui Website	440 buku, 8 SK Bupati, 24 laporan	270.000.000	
4	04	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kerapihan kantor selama satu tahun	12 bulan, 2 unit gedung	85.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kerapihan kantor selama satu tahun	12 bulan, 2 unit gedung	85.000.000	
4	04	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	12 bulan, 10 unit	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	12 bulan, 10 unit	15.000.000	
4	04	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun	1 paket, 20 buah toner	90.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun	1 paket, 20 buah toner	90.000.000	
4	04	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianyabarang cetakan selama satu tahun	1 paket, 10 buah	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianyabarang cetakan selama satu tahun	1 paket, 10 buah	50.000.000	
4	04	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKAD dan jasa perbaikan jaringan listrik selama satu tahun	12 bulan	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKAD dan jasa perbaikan jaringan listrik selama satu tahun	12 bulan	15.000.000	
4	04	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	1 unit, 50 buah	22.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	1 unit, 50 buah	22.000.000	
4	04	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturanperundang-undangan selama satu	12 bulan, 1 paket	25.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturanperundang-undangan selama satu	12 bulan, 1 paket	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tahun			undangan	tahun			
4	04	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman pegawai selama satu tahun	12 bulan, 4 jenis	135.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman pegawai selama satu tahun	12 bulan, 4 jenis	135.000.000
4	04	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam atau keluar daerah selama satu tahun	12 bulan	450.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam atau keluar daerah selama satu tahun	12 bulan	450.000.000
4	04	1	21	Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah	Tersusunnya Laporan realisasi penerimaan dana transfer dari pusat Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dari Propinsi	24 laporan	190.000.000	Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah	Tersusunnya Laporan realisasi penerimaan dana transfer dari pusat Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dari Propinsi	24 laporan	190.000.000
4	04	1	22	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	84 laporan	350.000.000	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	84 laporan	350.000.000
4	04	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Terlaksananya penerbitan SP2D belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan selama	8.500 dokumen	349.627.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan	Terlaksananya penerbitan SP2D belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan selama	8.500 dokumen	349.627.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				satu tahun			perbendaharaan	satu tahun			
4	04	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Terlaksananya Penerbitan Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas SKPD selama satu tahun	250 dokumen	123.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Terlaksananya Penerbitan Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas SKPD selama satu tahun	250 dokumen	123.000.000
4	04	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Terlaksananya Penerbitan SKPP selama satu tahun	1.500 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Terlaksananya Penerbitan SKPP selama satu tahun	1.500 dokumen	85.000.000
4	04	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	1.150.585.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	1.150.585.000
4	04	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPKAD dalam satu tahun	7 unit R-4	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPKAD dalam satu tahun	7 unit R-4	-
4	04	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	25.500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	1 unit	25.500.000
4	04	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	1 paket	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	1 paket	-
4	04	2	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubeler selama satu tahun	1paket	42.050.000	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubeler selama satu tahun	1paket	42.050.000
4	04	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya	4 unit Printer, 5 unit Laptop	92.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya	4 unit Printer, 5 unit Laptop	92.000.000
4	04	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan penataan gedung kantor BPKAD selama satu tahun	2 unit gedung, 12 bulan	500.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan penataan gedung kantor BPKAD selama satu	2 unit gedung, 12 bulan	500.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan			Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tahun			
4	04	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan selama satu tahun	1 unit mobil, 64 kali, 12 bulan	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan selama satu tahun	1 unit mobil, 64 kali, 12 bulan	50.000.000	
4	04	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama satu tahun	12 bulan, 5 unit R-4, 27 unit R-2, 211 kali	155.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama satu tahun	12 bulan, 5 unit R-4, 27 unit R-2, 211 kali	155.000.000	
4	04	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama satu tahun	45 unit, 12 bulan	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama satu tahun	45 unit, 12 bulan	30.000.000	
4	04	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama satu tahun	12 bulan, 1 unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama satu tahun	12 bulan, 1 unit	15.000.000	
4	04	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur selama satu tahun	1 paket, 12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur selama satu tahun	1 paket, 12 bulan	10.000.000	
4	04	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya selama satu tahun	12 bulan, 50 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya selama satu tahun	12 bulan, 50 unit	20.000.000	
4	04	2	38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor aset milik pemkab selama satu tahun	2 unit gedung, 12 bulan	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor aset milik pemkab selama satu tahun	2 unit gedung, 12 bulan	-	
4	04	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Terlaksananya pemeliharaan software dan sistem informasi selama satu tahun	2 sistem aplikasi, 12 bulan	211.035.000	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Terlaksananya pemeliharaan software dan sistem informasi selama satu tahun	2 sistem aplikasi, 12 bulan	211.035.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	450.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	450.000.000	
4	04	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bintek/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diklat	3 kali, 72 orang	450.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bintek/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diklat	3 kali, 72 orang	450.000.000	
4	04	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	874.130.500	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	874.130.500	
4	04	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya Perjanjian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Tersusunnya Dokumen SAKIP 2020 Tersusunnya LKjIP BPKAD Tahun 2019	2 dokumen, 20 buku	64.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya Perjanjian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Tersusunnya Dokumen SAKIP 2020 Tersusunnya LKjIP BPKAD Tahun 2019	2 dokumen, 20 buku	64.000.000	
4	04	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD semester I Tahun 2020 dan Prognosisnya	2 dokumen, 20 buku	20.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD semester I Tahun 2020 dan Prognosisnya	2 dokumen, 20 buku	20.000.000	
4	04	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD dan PPKD akhir tahun 2019 Tersusunnya LKPJ Tahun 2019 Tersusunnya LPPD Tahun 2019	1 dokumen, 20 buku	54.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD dan PPKD akhir tahun 2019 Tersusunnya LKPJ Tahun 2019 Tersusunnya LPPD Tahun 2019	1 dokumen, 20 buku	54.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersusunnya laporan keuangan Daerah semesteran dan prognosisnya (Konsolidasi)	4 dokumen,100 buku	103.812.500	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersusunnya laporan keuangan Daerah semesteran dan prognosisnya (Konsolidasi)	4 dokumen,100 buku	103.812.500	
4	04	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 (Konsolidasian)	2 dokumen,10 buku, 60 bendel	316.681.250	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 (Konsolidasian)	2 dokumen,10 buku, 60 bendel	316.681.250	
4	04	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	12 laporan	162.730.700	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	12 laporan	162.730.700	
4	04	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi RKPD Triwulanan (Laporan) Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2020 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan fungsi SPIP self assessment (SA) oleh satuan gugus tugas SPIP Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Terlaksananya rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD	100 %	152.906.050	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi RKPD Triwulanan (Laporan) Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2020 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan fungsi SPIP self assessment (SA) oleh satuan gugus tugas SPIP Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Terlaksananya rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD	100 %	152.906.050	
4	04	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	60%	150.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	60%	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPABPKAD/PPKD	80 buku, 10 dokumen, 20 buku	150.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPABPKAD/PPKD	80 buku, 10 dokumen, 20 buku	150.000.000	
4	04	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD Ketepatan waktu penyusunan SPD Ketepatan waktu pencairan dana Persentase pemanfaatan aset daerah Persentase pengamanan aset daerah Persentase pemindahtanganan aset daerah Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	60%	8.798.831.500	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD Ketepatan waktu penyusunan SPD Ketepatan waktu pencairan dana Persentase pemanfaatan aset daerah Persentase pengamanan aset daerah Persentase pemindahtanganan aset daerah Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	60%	8.798.831.500	
4	04	15	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standarisasi satuan harga tahun 2021 dan perubahan SSH tahun 2020	200 buku, 2 dokumen	182.000.000	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standarisasi satuan harga tahun 2021 dan perubahan SSH tahun 2020	200 buku, 2 dokumen	182.000.000	
4	04	15	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1 perbup, 50 buku	112.562.000	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1 perbup, 50 buku	112.562.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD	1 Perbup, 150 buku	141.320.000	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD	1 Perbup, 150 buku	141.320.000	
4	04	15	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tahun 2021	1 dokumen, 250 buku	370.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tahun 2021	1 dokumen, 250 buku	370.000.000	
4	04	15	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	1 dokumen, 1 paket	100.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	1 dokumen, 1 paket	100.000.000	
4	04	15	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020	1 dokumen, 250 buku	430.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020	1 dokumen, 250 buku	430.000.000	
4	04	15	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	1dokumen, 50 buku	96.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	1dokumen, 50 buku	96.000.000	
4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Raperda, 815 buku, 2 dokumen, 1 perda	375.512.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Raperda, 815 buku, 2 dokumen, 1 perda	375.512.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2019	1 dokumen, 139 buku, 1 perbup beserta lampirannya	63.250.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2019	1 dokumen, 139 buku, 1 perbup beserta lampirannya	63.250.000	
4	04	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD	60 orang	132.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD	60 orang	132.000.000	
4	04	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terlaksananya sertifikasi tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah	30 sertifikat, 274 papan identitas	250.000.000	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terlaksananya sertifikasi tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah	30 sertifikat, 274 papan identitas	250.000.000	
4	04	15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	12.400 dokumen	435.515.000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	12.400 dokumen	435.515.000	
4	04	15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB tanah aset milik Pemkab Pemalang	150 aset Tanah	40.000.000	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB tanah aset milik Pemkab Pemalang	150 aset Tanah	40.000.000	
4	04	15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya distribusi BMD selama satu tahun	6 unit	20.000.000	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya distribusi BMD selama satu tahun	6 unit	20.000.000	


Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKB dan RKPBU	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang (Dokumen) Tersusunnya SK Penetapan status pengguna BMD, RKBMD dan RKPBM selama satu tahun (Dokumen)	300 buku, 102 Dokumen	115.500.000	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKB dan RKPBU	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang (Dokumen) Tersusunnya SK Penetapan status pengguna BMD, RKBMD dan RKPBM selama satu tahun (Dokumen)	300 buku, 102 Dokumen	115.500.000	
4	04	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	2 dokumen	35.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	2 dokumen	35.000.000	
4	04	15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya laporan pemindahtanganan dan penghapusan BMD dalam satu tahun	4 kali, 12 bulan	150.000.000	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya laporan pemindahtanganan dan penghapusan BMD dalam satu tahun	4 kali, 12 bulan	150.000.000	
4	04	15	26	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD dalam satu tahun (Laporan)	12 laporan, 12 bulan	75.000.000	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD dalam satu tahun (Laporan)	12 laporan, 12 bulan	75.000.000	
4	04	15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah.	2 dokumen, 150 buku	135.300.000	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah.	2 dokumen, 150 buku	135.300.000	
4	04	15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD (Laporan)	100 kali kegiatan	120.000.000	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD (Laporan)	100 kali kegiatan	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan (Laporan)	4 temuan	87.872.000	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan (Laporan)	4 temuan	87.872.000
4	04	15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Terlaksananya sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100 org	200.000.000	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Terlaksananya sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100 org	200.000.000
4	04	15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Pemanfaatan Aset Daerah	24 kegiatan pemantauan	120.000.000	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Pemanfaatan Aset Daerah	24 kegiatan pemantauan	120.000.000
4	04	15	57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi).	2 laporan	300.000.000	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi).	2 laporan	300.000.000
4	04	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito	12 laporan, 30 Dokumen	115.000.000	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito	12 laporan, 30 Dokumen	115.000.000
4	04	15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya Laporan Rancangan KUA PPAS selama satu tahun	2 Dokumen	141.000.000	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya Laporan Rancangan KUA PPAS selama satu tahun	2 Dokumen	141.000.000
4	04	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk SKPD	50 unit	4.456.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk SKPD	50 unit	4.456.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. BPKAD selaku SKPD tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan tetapi selaku PPKD, BPKAD menampung usulan masyarakat yang diakomodir ke dalam belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa atau masuk dalam belanja non program. Usulan masyarakat melalui musrenbang tersebut tidak masuk ke dalam rencana kerja (renja) BPKAD selaku SKPD sehinggenrencana BPKAD tidak menjelaskan mengenai usulan masyarakat tersebut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;
- d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset daerah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;
- e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset yang dikuasai dan Neraca Daerah.
- f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Ekuitas (LE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang telah diraih 3 tahun berturut-turut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.2.1. Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu *“Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”*

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD adalah *"Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"*

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, agar semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) "

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan stratejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 merupakan kegiatan regular yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari 6 Program dengan 71 kegiatan. Kegiatan yang mendukung program pada RPJMD yang belum masuk pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD digeser ke program yang sesuai agar lebih mudah mengelompokkan kegiatan-kegiatan pendukung program pada RPJMD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel :3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				14.207.000.000				14.207.000.000		
4	<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan</u> <u>Bidang Keuangan</u>				14.207.000.000				14.207.000.000		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran setiap bulan		12 bulan	2.832.000.000			12 bulan	2.832.000.000		
4	04	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya surat/ notdinyang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	BPKAD	8.000 surat/ notdin	50.000.000	APBD	7.800 surat/ notdin	50.000.000
4	04	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	BPKAD	4 jenis	610.000.000	APBD	4 jenis	610.000.000
4	04	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya JaminanKendaraan dinas dan Alat Berat Milik Pemkab Pematang Jaya	BPKAD	155 unit	830.000.000	APBD	205 unit	830.000.000
4	04	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/ operasional	BPKAD	46 Unit	22.000.000	APBD	39 Unit	22.000.000
4	04	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara selama satu tahun Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD Terpublikasinya Data, Informasi dan kegiatan kepada Publik melalui Website	BPKAD	30 Dokumen	270.000.000	APBD	30 Dokumen	270.000.000
4	04	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kerapihan	BPKAD	4 orang	105.000.000	APBD	4 orang	105.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
		kantor selama satu tahun										
4	04	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	BPKAD	10 unit	30.000.000	APBD		10 unit	30.000.000
4	04	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun	BPKAD	31 Jenis	105.000.000	APBD		35 Jenis	105.000.000
4	04	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianyabarang cetakan selama satu tahun	BPKAD	15 Jenis	70.000.000	APBD		15 Jenis	70.000.000
4	04	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKAD dan jasa perbaikan jaringan listrik selama satu tahun	BPKAD	12 kali	30.000.000	APBD		12 kali	30.000.000
4	04	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	BPKAD	10 unit	65.000.000	APBD		10 unit	65.000.000
4	04	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturanperundang-undangan selama satu tahun	BPKAD	2 jenis	45.000.000	APBD		2 jenis	45.000.000
4	04	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman pegawai selama satu tahun	BPKAD	4 jenis	150.000.000	APBD		4 jenis	150.000.000
4	04	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam atau keluar daerah selama satu tahun	BPKAD	2 Jenis	450.000.000	APBD		2 Jenis	450.000.000
4	04	1	21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan realisasi penerimaan dana transfer dari pusat Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dari Propinsi	BPKAD	16 laporan	0	APBD		16 laporan	0
4	04	1	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke	BPKAD	3.110 Dokumen	0	APBD		3.110 Dokumen	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
		RKD Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan										
4	20	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Terlaksananya penerbitan SP2D belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan selama satu tahun	BPKAD	8.500 dokumen	0	APBD		8.500 dokumen	0
4	20	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Terlaksananya Penerbitan Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas SKPD selama satu tahun	BPKAD	250 dokumen	0	APBD		250 dokumen	0
4	20	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Terlaksananya Penerbitan SKPP selama satu tahun	BPKAD	500 dokumen	0	APBD		500 dokumen	0
4	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	1.780.000.000			12 bulan	1.780.000.000
4	20	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPKAD dalam satu tahun	BPKAD	10 unit	300.000.000	APBD		10 unit	300.000.000
4	20	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	BPKAD	5 unit	80.000.000	APBD		5 unit	80.000.000
4	20	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	BPKAD	1 paket	60.000.000	APBD		1 paket	60.000.000
4	20	2	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubeler selama satu tahun	BPKAD	1paket	50.000.000	APBD		1paket	50.000.000
4	04	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya	BPKAD	10 unit	300.000.000	APBD		10 unit	300.000.000
4	04	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan penataan gedung kantor BPKAD selama satu tahun	BPKAD	2unit gedung	500.000.000	APBD		2unit gedung	500.000.000
4	04	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan selama satu tahun	BPKAD	1 unit mobil	60.000.000	APBD		1 unit mobil	60.000.000
4	04	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama satu tahun	BPKAD	45 unit	155.000.000	APBD		45 unit	155.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
4	04	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama satu tahun	BPKAD	35 unit	50.000.000	APBD		35 unit	50.000.000
4	04	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama satu tahun	BPKAD	1 unit	30.000.000	APBD		1 unit	30.000.000
4	04	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur selama satu tahun	BPKAD	1 paket	10.000.000	APBD		1 paket	10.000.000
4	04	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya selama satu tahun	BPKAD	93 unit	20.000.000	APBD		93 unit	20.000.000
4	04	2	38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor aset milik pemkab selama satu tahun	BPKAD	1 unit gedung	120.000.000	APBD		1 unit gedung	120.000.000
4	04	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Terlaksananya pemeliharaan software dan sistim informasi selama satu tahun	BPKAD	2 unit sistem aplikasi	45.000.000	APBD		2 unit sistem aplikasi	45.000.000
4	04	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki Kompetensi		100%	450.000.000			100%	450.000.000
4	04	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bintek/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diklat	BPKAD	75 orang	450.000.000	APBD		75 orang	450.000.000
4	04	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersedia		100%	910.000.000			100%	910.000.000
4	04	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya Perjanjian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Tersusunnya Dokumen SAKIP 2020 Tersusunnya LKJIP BPKAD Tahun 2019	BPKAD	17 dokumen	65.000.000	APBD		17 dokumen	65.000.000
4	04	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD semester I Tahun 2020 dan Prognosisnya	BPKAD	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 laporan	30.000.000
4	04	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan BPKAD dan PPKD akhir tahun 2019 Tersusunnya LKPJ Tahun 2019	BPKAD	3 Dokumen	60.000.000	APBD		3 Dokumen	60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
		Tersusunnya LPPD Tahun 2019										
4	04	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersusunnya laporan keuangan Daerah semesteran dan prognosinya (Konsolidasi)	BPKAD	1 Laporan	115.000.000	APBD		1 Laporan	115.000.000
4	04	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 (Konsolidasian)	BPKAD	1 Laporan	320.000.000	APBD		1Laporan	320.000.000
4	04	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	BPKAD	24 Dokumen	165.000.000	APBD		24 Dokumen	165.000.000
4	04	6	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi RKPDP Triwulanan (Laporan) Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2020 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan fungsi SPIP self assessment (SA) oleh satuan gugus tugas SPIP Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Terlaksananya rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD	BPKAD	95Dokumen	155.000.000	APBD		95Dokumen	155.000.000
4	04	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD		100%	175.000.000			100%	175.000.000
4	04	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPABPKAD/PPKD	BPKAD	10 Dokumen	175.000.000	APBD		10 Dokumen	175.000.000
4	04	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD Ketepatan waktu penyusunan SPD		100 % 100%	8.060.000.000			100 % 100%	8.060.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
		Ketepatan waktu pencairan dana Persentase pemanfaatan aset daerah Persentase pengamanan aset daerah Persentase pemindahtanganan aset daerah Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah		100% 90% 60% 90% 100% 100% 100%				100% 90% 60% 90% 100% 100% 100%				
4	04	15	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standarisasi satuan harga tahun 2021 dan perubahan SSH tahun 2020	BPKAD	2 dokumen	185.000.000	APBD		2 dokumen	185.000.000
4	04	15	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	BPKAD	1 Dokumen	135.000.000			1 Dokumen	135.000.000
4	04	15	4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	170.000.000	APBD		1 Dokumen	170.000.000
4	04	15	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tahun 2021	BPKAD	1 dokumen	410.000.000	APBD		1 dokumen	410.000.000
4	04	15	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	BPKAD	1 dokumen	110.000.000	APBD		1 dokumen	110.000.000
4	04	15	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020	BPKAD	1 dokumen	430.000.000	APBD		1 dokumen	430.000.000
4	04	15	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	BPKAD	1dokumen	110.000.000	APBD		1dokumen	110.000.000
4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	BPKAD	1 Dokumen	380.000.000	APBD		1 Dokumen	380.000.000
4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2019	BPKAD	1 dokumen	65.000.000	APBD		1 dokumen	65.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
	APBD.											
4	04	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD	BPKAD	1 kali	105.000.000	APBD		1 kali	105.000.000
4	04	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terlaksananya sertifikasi tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah	BPKAD	46 sertifikat, 96 papan identitas	260.000.000	APBD		46 sertifikat, 96 papan identitas	260.000.000
4	04	15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	BPKAD	0 dokumen	0	APBD		0 dokumen	0
4	04	15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB tanah aset milik Pemkab Pemalang	BPKAD	150 SPT	50.000.000	APBD		150 SPT	50.000.000
4	04	15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya distribusi BMD selama satu tahun	BPKAD	3 kali	30.000.000	APBD		3 kali	30.000.000
4	04	15	23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKB dan RKPBU	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang (Dokumen) Tersusunnya SK Penetapan status pengguna BMD, RKBMD dan RKPMD selama satu tahun (Dokumen)	BPKAD	4 Dokumen	135.000.000	APBD		4 Dokumen	135.000.000
4	04	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	BPKAD	4 dokumen	35.000.000	APBD		4 dokumen	35.000.000
4	04	15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya laporan pemindahtanganan dan penghapusan BMD dalam satu tahun	BPKAD	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
4	04	15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD dalam satu tahun (Laporan)	BPKAD	12 laporan	100.000.000	APBD		12 laporan	100.000.000
4	04	15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah.	BPKAD	1 dokumen	140.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000
4	04	15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD (Laporan)	BPKAD	80 Laporan	120.000.000	APBD		80 Laporan	120.000.000
4	04	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan (Laporan)	BPKAD	4 Dokumen	90.000.000	APBD		4 Dokumen	90.000.000
4	04	15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Terlaksananya sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	BPKAD	1 kali	0	APBD		1 kali	0
4	04	15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Pemanfaatan Aset Daerah	BPKAD	4 Dokumen	120.000.000	APBD		4 Dokumen	120.000.000
4	04	15	57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi).	BPKAD	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	04	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito	BPKAD	24 Laporan	150.000.000	APBD		24 Laporan	150.000.000
4	04	15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya Laporan Rancangan KUA PPAS selama satu tahun	BPKAD	2 Laporan	190.000.000	APBD		2 Laporan	190.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
4	04	15	60	Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Tersusunnya Laporan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung Selama satu tahun	BPKAD	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	0
4	04	15	61	Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu tahun	BPKAD	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	0
4	04	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk SKPD	BPKAD	8 Unit	2.000.000.000	APBD		8 Unit	2.000.000.000
4	04	15	64	Penerbitan SP2D belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	BPKAD	5.000 Dokumen	350.000.000	APBD		5.000 Dokumen	350.000.000
4	04	15	65	Penerbitan SP2D belanja tidak langsung	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	BPKAD	5.000 Dokumen	350.000.000	APBD		5.000 Dokumen	350.000.000
4	04	15	66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	Tersusunnya Dokumen Penghentian pembayaran Gaj PNSD	BPKAD	500 SKPP(Doc)	85.000.000	APBD		500 SKPP (Doc)	85.000.000
4	04	15	67	Penyusunan Dokumen Pendukung pembayaran gaji :PNSD	Tersusunnya Dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	BPKAD	12.400 Dokumen	100.000.000	APBD		12.400 Dokumen	100.000.000
4	04	15	68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Terlaksananya sosialisasi/Bintek pengelola aset pada SKPD	BPKAD	2 kali	250.000.000	APBD		2 kali	250.000.000
4	04	15	69	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	BPKAD	1 unit	300.000.000	APBD		1 unit	300.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	15	70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan LKT	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Propinsi (Laporan) Tersusunnya Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dari Pusat	BPKAD	16 Laporan	195.000.000	APBD		16 Laporan	195.000.000
4	04	15	71	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan Tersusunnya Laporan Realisasi Pengeluaran PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Tersusunnya Laporan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	BPKAD	1.000 Dokumen	355.000.000	APBD		1.000 Dokumen	355.000.000
4	04	15	72	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Terlaksananya penerbitan SPD SKPD	BPKAD	100 Dokumen	105.000.000	APBD		100 Dokumen	105.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2016 -2021.

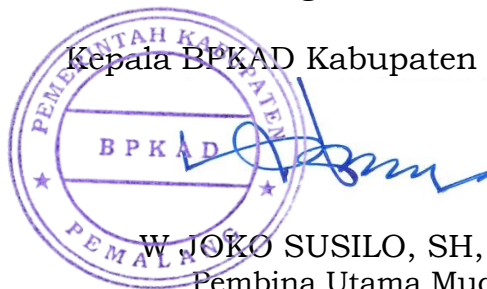
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Tahun 2020 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penyesuaian kegiatan agar sinkron dengan program sehingga kegiatan pendukung program yang tercantum pada RPJMD yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada satu kelompok program.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun SAKIP.

Dengan adanya penyesuaian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020, diharapkan BPKAD lebih maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Pemalang, 9 Juni 2019

Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang



W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005

